

DAFTAR BACAAN

- Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor
- Aryani, F. K., & Djajaputra, G. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 26–48
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup, Vol. 5 No. 2 Januari 2019
- Christy, Evie, & Dewi Rumaisa Wilsen. (2020). "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2).
- Fadhli, M., Arrisman, & Rumainur. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, 4(4), 590–600.
- Fратиwi & Rafiq Sari. Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 3. 2023
- Habib Adjie. "Tergerusnya Droit De Preference (Asas Prioritas) Kreditor, Ketika Debitor Tersangkut Tindak Pidana Korupsi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 2
- Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta
- Hartanto, J. A. (2015). Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Laksbank Yustitia

- Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama, *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 1–16
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). Implementasi Asas Droit De Preference Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Akta*, 4(1), 97–102.
- Lila Kurniawati dan Lathifah Hanim. 2017 "Implementasi Asas Droit De Preference terhadap Jaminan Hak Tanggungan oleh Pihak Perbankan dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Akta* 4, no. 1. 97–102.
- Makmur, S. (2018). "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana,
- Prasetyo, T. (2019). Batasan Waktu Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Separatis dalam Proses Kepailitan: Kajian Yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum**, 15(2)
- Rachmat, R., & Suherman, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1)
- Rasyid Anbari, 2017. "Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau*, Vol. IV No 2
- Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- Setyabudi, Albertus Hansen, & Sylvia Janisriwati. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Preferen dalam". *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(3).

- Sibli, N., Maramis, R. A., & Soeikromo, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. *Lex Et Societatis*, 11(1), 5–19
- Sihotang, Dian Pribadi, Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 2, 2024
- Silalahi, U., & Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35– 47.
- Singal, N. Y., Rumimpunu, F., & Tampongangoy, G. H. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 10(1), 229–239.
- Sirait, G. N., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2021). Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1324–1333.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*, 13(2), 104–114.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Pustaka Utama Grafiti. 2009
- Sutrisno, R. B. (2020). Sinkronisasi Pengaturan Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan oleh Kreditor Separatis Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang